

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal, karena masih banyak terjadi praktik penambangan illegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kurangnya jumlah personil yang berkompeten dan tidak ada tempat untuk menyimpan alat-alat sitaan penambangan pasir illegal.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah:

1. Menjalinkan kerja sama yang baik antara seluruh Perangkat Desa setempat, masyarakat setempat dan pelaku usaha pertambangan setempat dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.
2. Koordinasi antara para aparat penegak hukum dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral harus lebih intensif.
3. Penambahan jumlah personil yang berkompeten dalam menjalankan fungsi pengawasan.
4. Perlunya tempat guna menyimpan alat-alat sitaan dari praktik penambangan illegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buk-buku

- Djauhari Noor, 2006, *Geologi Lingkungan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- H. Bagir Manan, 2004, *Hukum Pertambangan*, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- H.R Mulyanto, 2007, *Sungai Fungsi & Sifat-sifatnya*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nurdi Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Gitamedia Press, Jakarta.
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan Di bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Victor M. Situmorang, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111 Tahun 2010, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142 Tahun 2010, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6, Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Mineral, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 62, Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Internet

Adam Fadililah, 2017, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Praktek Penambangan Pasir Dan Batu Di Aliran Sungai Brantas Ditinjau Dari Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup" (Studi Di Kabupaten Kediri)*, <http://eprints.umm.ac.id>, diakses 9 September 2018.

Bagus Aryo Wicaksono, 2019, *33 Perusahaan Tambang Pasir Sungai Progo Diwarning*, <https://jogjainside.com/33-perusahaan-tambang-pasir-sungai-progo-diwarning/>, diakses 8 Mei 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, <https://kbbi.web.id/tugas/fungsi/wewenang>, diakses 8 September 2018.

Karlina Sintia Dewi, 2019, *Warga Kulonprogo Blokade Pemasangan Patok di Tambang Pasir*, www.liputan6.com/news/read/3869766/warga-kulonprogo-blokade-pemasangan-patok-di-tambang-pasir, diakses 8 Mei 2019.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018, <https://www.esdm.go.id>, diakses 12 September 2018.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018, <https://www.pu.go.id>, diakses 12 September 2018.

Kusno S.Utomo, 2018, *Penambangan Pasir di Kali Progo Makin Mengkhawatirkan*, <http://www.radarjogja.co.id/2018/04/24/penambangan-pasir-di-kali-progo-makin-mengkhawatirkan>, diakses 22 Agustus 2018.

